



**PEMERINTAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG**



**DALEV RENJA  
TRIWULAN IV  
TAHUN 2020**



**INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
2020**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alaamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya bahwa Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2020 telah dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana amanat Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 259, mengamanatkan bahwa Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah provinsi, dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan, kemudian Hasil evaluasi Renja PD provinsi menjadi bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah provinsi untuk tahun berikutnya.

Untuk menjamin bahwa Renja telah menjabarkan Renstra Perangkat Daerah dengan baik, maka Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan capaian target kinerja dan anggaran program/kegiatan Renja PD, guna mendukung pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan daerah tahun 2020. Evaluasi hasil Renja PD ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi indikator target kinerja dan anggaran berdasarkan DPA Perangkat Daerah dengan indikator target kinerja anggaran dalam Renja PD Tahun 2020. Hasil evaluasi sebagaimana yang telah tersusun di dalam laporan ini akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Renja Inspektorat Daerah untuk tahun berikutnya.

Pada akhirnya semoga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat mendukung tercapainya kinerja untuk mendukung program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Pangkalpinang, Januari 2021

INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTO  
Pemula Utama Madya  
NIP. 196306121985031001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penyusunan Evaluasi Hasil Renja .....	3
<b>BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA</b>	
2.1 Gambaran Umum .....	4
2.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	7
2.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	8
2.4 Rencana Program dan Kegiatan .....	11
2.5 Perbandingan Program Kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA .....	15
2.6 Capaian Kinerja Program Kegiatan .....	21
<b>BAB III KENDALA YANG DIHADAPI</b>	
3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun Anggaran 2020.....	26
3.2 Saran Tindak Lanjut .....	26
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	27
4.2 Rekomendasi .....	27
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran antara RPJMD dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	7
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	10
Tabel 2.4.1	Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2020 .....	11
Tabel 2.4.2	Keterkaitan antara Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan .....	13
Tabel 2.5.1	Perbandingan antara Program Kegiatan dalam Renja 2020 dan Renstra 2017-2022 .....	15
Tabel 2.5.2	Kesesuaian antara Program/Kegiatan didalam Renja 2020 dan Renstra 2017-2022.....	17
Tabel 2.5.3	Perbandingan Target Capaian Kinerja Renstra dengan Renja.....	19
Tabel 2.6	Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2020.....	21

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah .....	5
Gambar 2.4.1	Anggaran Belanja langsung dan Tidak Langsung Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	11
Gambar 2.4.2	Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 .....	12
Gambar 2.4.3	Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Terkait Pentingnya Evaluasi .....	15
Gambar 2.5.1	Jumlah Program Renja 2020 dan Renstra 2017-2022 .....	16
Gambar 2.5.2	Jumlah Kegiatan Renja 2020 dan Renstra 2017-2022 .....	17
Gambar 2.6	Realisasi Anggaran dan Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2020.....	25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pelaksanaan tahun kedua Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 berpedoman pada Renstra Inspektorat Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja K/L terkait dan dipadukan dengan Rencana Kerja pemerintah kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS hingga sampai dengan proses penyusunan APBD Tahun 2020.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) juga untuk memenuhi tuntutan masyarakat umum terhadap penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pelayanan prima dari Pemerintah Daerah terhadap kepentingan masyarakat banyak, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.2. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 28 Desember Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
- i. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 7 Seri E); dan
- j. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 Nomor 38 Seri E).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Laporan pengendalian dan evaluasi rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menetapkan target kinerja yang telah dicapai sebagai acuan untuk pengukuran kinerja tahun berikutnya dengan berpedoman pada Renstra

yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari pengendalian dan evaluasi rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah;

1. Menilai realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
2. Mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan yang dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Mensinergikan sasaran yang dicapai dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap indikator kinerja program/kegiatan untuk mengukur realisasi anggaran dan realisasi kinerja.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja**

Adapun sistematika penyusunan laporan pengendalian evaluasi hasil rencana kerja (Dalev Renja ) triwulan IV Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

- 2.1 Gambaran Umum
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2.4 Rencana Program dan Kegiatan
- 2.5 Perbandingan Program Kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA
- 2.6 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

BAB III KENDALA DAN SASARAN TINDAK LANJUT

- 3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun Anggaran 2020
- 3.2 Saran Tindak Lanjut

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



## **BAB II**

### **EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA**

#### **2.1 Gambaran Umum**

Akselerasi perubahan dan peningkatan tata kelola pemerintahan semakin menempatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada posisi strategis dalam mendorong perbaikan kinerja aparatur, baik pola pikir maupun pola tindak dengan pemberian rekomendasi yang lebih handal dan akuntabel. Sejalan dengan itu, guna memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun tugas, fungsi dan struktur Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih lugas ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tugas pokok Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi juga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi memiliki fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

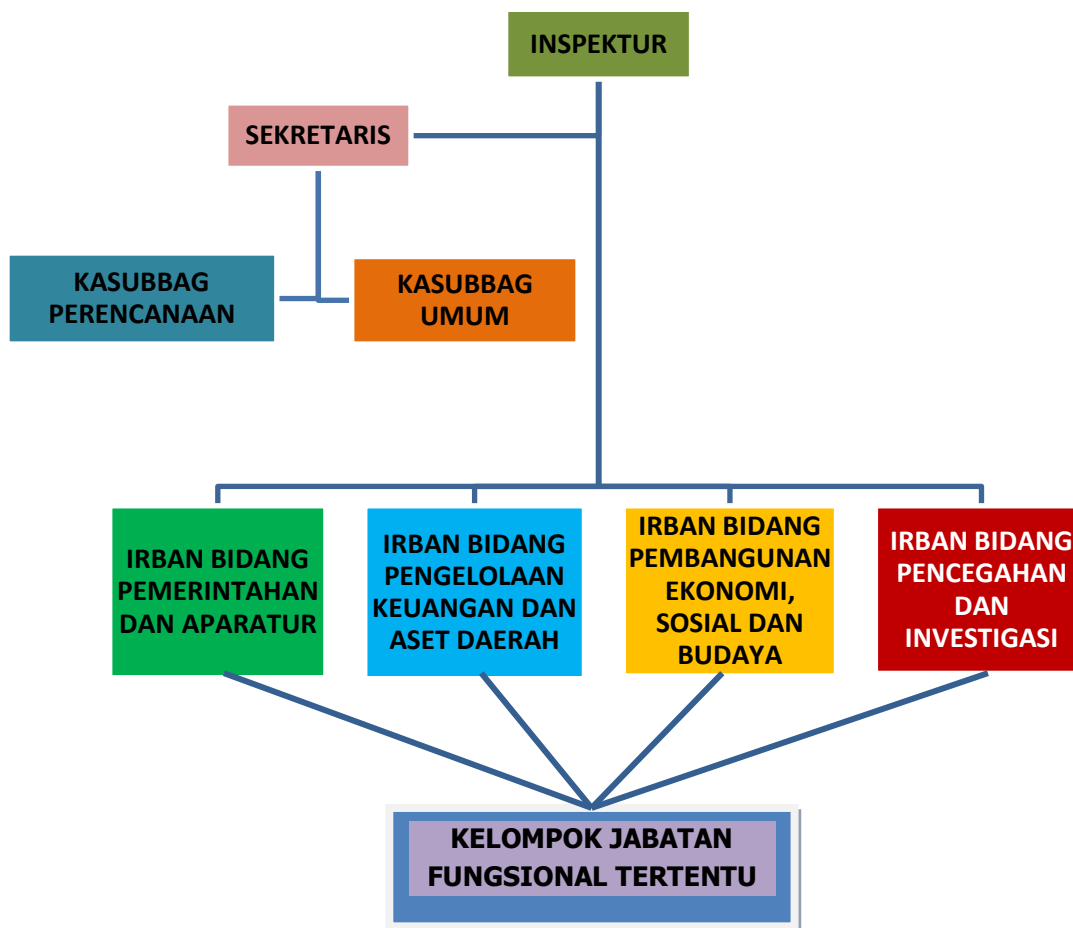
- a. 1 (satu) orang dengan jabatan Inspektur yang merupakan jabatan eselon IIa;
- b. 1 (satu) orang dengan jabatan Sekretaris yang setara dengan jabatan eselon IIIa;

- c. 4 (empat) orang dengan jabatan Inspektur Pembantu yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- d. 2 (dua) orang dengan jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat yang setara dengan jabatan eselon IVa;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari:
  - 1. Jabatan Fungsional Auditor;
  - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian; dan
  - 4. Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Secara sistematis, struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar 2.1. berikut:

**GAMBAR 2.1**

**Bagan Struktur Organisasi  
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Pengawasan, Inspektorat mendukung pencapaian Misi Kelima dalam RPJMD Tahun 2017-2022 **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pembangunan Demokrasi"** dengan tujuan **"Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas"**. Secara kelembagaan, kinerja Inspektorat dapat dinilai dari Tingkat Kapabilitas APIP sebagaimana kriteria penilaian Internal Audit Capability Model (IACM) yang membagi Kapabilitas APIP kedalam Tingkatan/Level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Untuk memenuhi capaian Kapabilitas APIP Level 3 dengan pemenuhan elemen yang harus dilaksanakan, diantaranya dengan melakukan langkah-langkah strategis dalam bidang pengawasan yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori tugas pengawasan, yaitu:

A. Kinerja Rutin Pengawasan dan kinerja, dengan kegiatan:

1. Reviu RPJMD,
2. Reviu Renstra PD
3. Reviu RKPD,
4. Reviu Renja PD
5. Reviu KUA-PPAS
6. Reviu RKA SKPD,
7. Reviu LKPD,
8. Reviu Laporan Kinerja
9. Reviu penyerapan anggaran dan reviu penyerapan PBJ, pemeriksaan reguler perangkat daerah dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak, evaluasi SPIP, evaluasi LPPD, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP
10. Hal baru dilakukan adalah pemeriksaan/audit kinerja, khusus terkait pelayanan publik dan pemeriksaan/audit atas optimalisasi pendapatan.

B. Pengawasan/Asistensi Program Prioritas Nasional:

1. Monitoring dan evaluasi dana desa dan dana BOS
2. Penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
3. Operasionalisasi kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (bersama dengan Polda Babel dan stakeholder lainnya)
4. Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP

C. Pengawasan Reformasi Birokrasi

1. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (capaian program nilai 70,79)
2. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik
3. Verifikasi data sistem MCP KPK atas Pelaporan Rencana Aksi PPK terintegrasi dan Korsupgah
4. Verifikasi LHKPN/LHKASN

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki penetapan petunjuk dan pedoman yang ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Tugas Pokok *membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah*, serta menyelenggarakan fungsi pengawasan antara lain, yaitu *perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan*.

Sebagaimana visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022:

### Visi

*"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"*

### Misi V

*"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pembangunan Demokrasi"*

Tabel 2.2

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran antara RPJMD dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD				TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang berkualitas (bersih dan	1 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	Meningkatnya Kepatuhan thd ketentuan Peraturan	Menurunnya materialitas temuan hasil pemeriksaan

		akuntabel)			Perundang-undangan	
			2	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	Meningkatnya Kematangan Implementasi Maturitas SPIP	Meningkatnya unit kerja dengan Maturitas SPIP level 3
			3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi	Meningkatnya Nilai Evaluasi Internal	Meningkatnya PD yang memperoleh nilai SAKIP "A"
			4	Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD)	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP

### 2.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis. Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2020, meliputi:

1. Berdasarkan analisis, maka strategi yang ditempuh dalam pelaksanaan Rencana Kerja Mendorong Percepatan dan peningkatan penggunaan sistem aplikasi berbasis elektronik, mulai dari program perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset hingga monitoring dan evaluasi secara terintegrasi;
2. Peningkatan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Melakukan pembinaan secara kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Audit, Reviu, konsultasi, pemantauan dan pengawasan lain, baik pemeriksaan reguler atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan, pengelolaan barang milik daerah/aset, reviu terhadap LKPD, serta pemeriksaan lainnya dalam rangka pembinaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
4. Melakukan evaluasi yang lebih fokus dan berkualitas terhadap Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

5. Memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaporan pengaduan dan kotak pengaduan dan WBS (Whistle Blower System).
6. Penyelesaian Tindak Lanjut secara cepat dan tepat terhadap rekomendasi hasil temuan pengawasan;
7. Memberikan kesempatan kepada tenaga aparatur pengawas dan auditor untuk meningkatkan kemampuan kompetensi di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

Sedangkan arah Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

- 1) Memaksimalkan sistem Satuan Tugas SPIP (SISATGAS SPIP) dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penguatan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2) Memaksimalkan Peran APIP sebagai katalis dalam pendampingan dan asistensi serta memperbanyak volume konsultasi kepada setiap Perangkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan secara lebih *preventive*, *consultative* dan *quality assurance* untuk memberikan keyakinan yang lebih memadai
- 2) Peningkatan pelayanan publik yang berasaskan *good governance* dan *clean government* diprioritaskan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan pengawasan dalam upaya menemukan penyebab terjadinya penyimpangan, hambatan serta kelemahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diprioritaskan pada upaya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan;
- 4) Peningkatan kualitas aparatur di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diprioritaskan pada upaya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikasi teknis keahlian tertentu.

Secara ringkas, rumusan pernyataan strategi dan kebijakan yang mendukung tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang disajikan dalam tabel 2.3. di bawah ini.

**Tabel. 2.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi</b> <i>"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"</i>			
<b>Misi V</b> <i>"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pembangunan Demokrasi"</i>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Tujuan 1  Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Sasaran 1.1	Strategi 1.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja APIP serta memaksimalkan perannya sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultansi
	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan  Meningkatkan kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah  Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP
Tujuan 2: Meningkatkan Pemerintahan yang efektif dan efisien	Sasaran 2.1 Menurunnya jumlah temuan bersifat materiil pada OPD	Strategi 2.1 Penataan kebijakan dan sistem pengawasan	Peningkatan penguatan pengawasan melalui sistem pengawasan berbasis resiko dan peta resiko pengawas

## 2.4 Rencana Program dan Kegiatan

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 27.048.256.516,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.117.713.222,- dan Belanja Langsung Sebesar Rp. 13.930.543.294,-

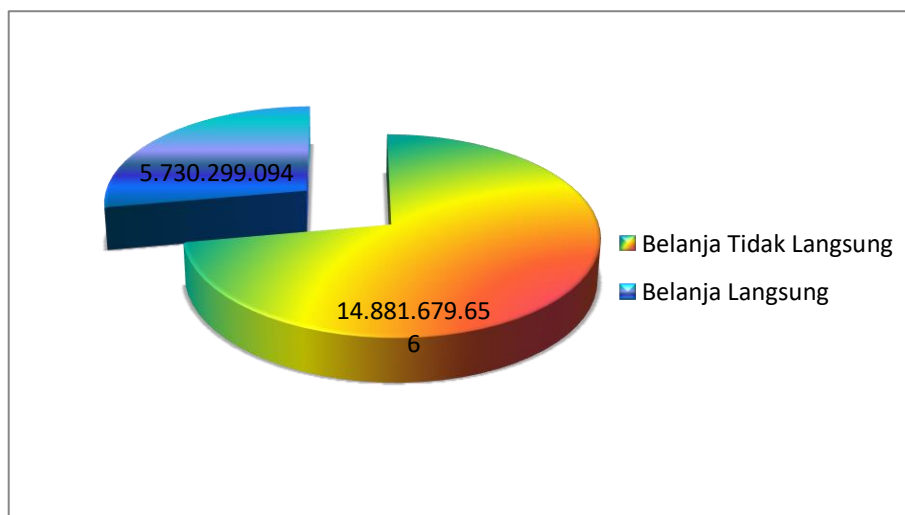
terdiri dari 4 Program dengan 23 kegiatan. Namun karena adanya pandemi Covid-19, menyebabkan perubahan anggaran (refocusing anggaran) dengan belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.117.713.222,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.230.299.094,-. Sedangkan pada APBD-Perubahan, belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.881.679.656,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.730.299.094,-. Dari 23 kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan I, masih tersisa 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II sampai dengan Triwulan IV.

Tabel 2.4.1  
Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2020

No.	Belanja	Belanja Tidak langsung	Belanja Langsung	Jumlah
1.	APBD	Rp. 13.117.713.222,-	Rp. 13.930.543.294,-	Rp. 27.048.256.516,-
	Refocusing Anggaran	Rp. 13.117.713.222,-	Rp. 5.230.299.094,-	Rp. 18.348.012.316,-
	APBD-P	Rp. 14.881.679.656,-	Rp. 5.730.299.094,-	Rp. 20.611.978.750,-

Gambar 2.4.1

Anggran Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020



Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dapat



mewujudkan visi dan misi Gubernur khususnya visi misi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4.2



Tabel. 2.4.2

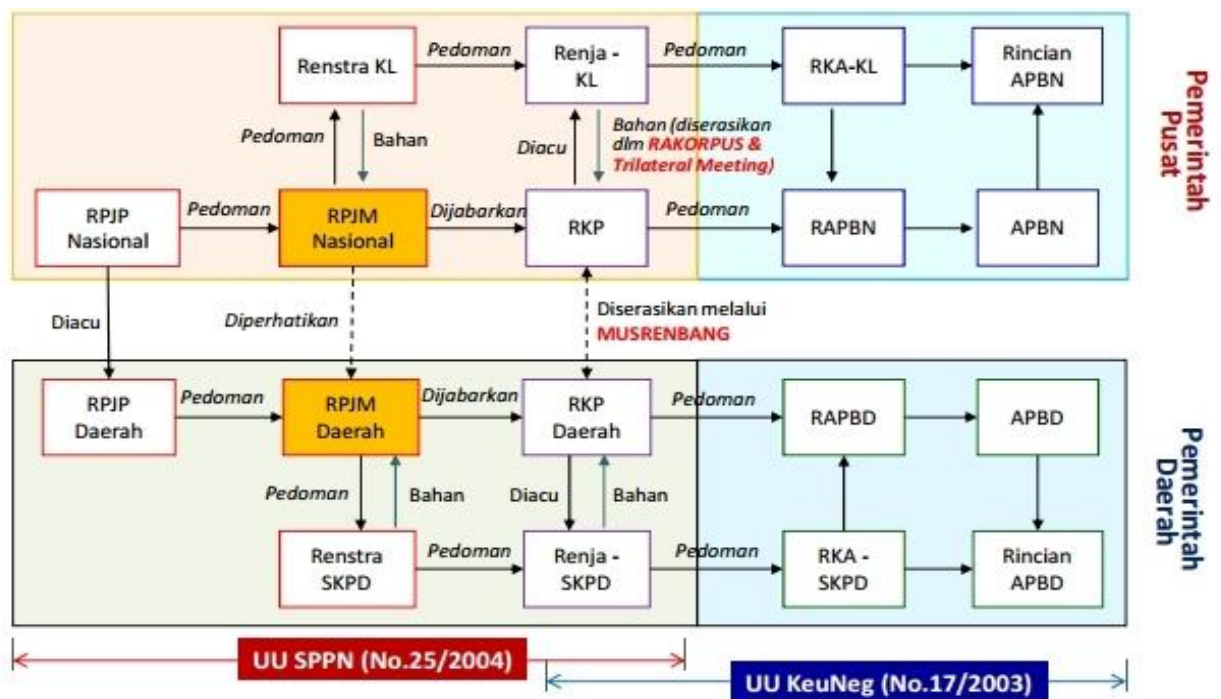
Keterkaitan antara Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan

### KETERKAITAN ANTARA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Tingkat kepuasan aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%
Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
		Pelaporan Rencana Aksi PPK terintegrasi dan Korsupgah	Persentase penyelesaian laporan dalam sistem MCP dan Korsupgah
		Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah evaluasi SAKIP dan EKPPD pada Provinsi dan Kab/Kota
		Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah Unit Kerja ZI
		Monev Laporan Gratifikasi	Jumlah Laporan Gratifikasi
		Penanganan Whistle Blower System	Jumlah laporan pengaduan melalui WBS
		Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN	Persentase Kepatuhan Pelaporan
	Prosentase jumlah	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah PD yang diawasi dalam audit/reviu/evaluasi

Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas TL Penyelesaian rekomendasi LHP APIP dan BPK
		Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
	Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah.	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah
	Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti
		Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli
	Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya	Peningkatan capaian Level Maturitas SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)			Tingkat Akurasi Data atas temuan hasil pengawasan/pemeriksaan
Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan memahami SPIP
Survey Penilaian Integritas			Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas

Gambar 2.4.3  
Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  
Terkait Pentingnya Evaluasi



## 2.5 Perbandingan Program Kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA

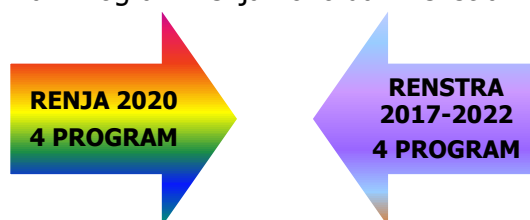
Adapun perbandingan antara Program Kegiatan dalam Renja 2020 dan Renstra 2017-2022 sesuai tabel berikut:

Tabel 2.5.1

No.	PROGRAM	KEGIATAN RENJA 2020	KEGIATAN RENSTRA 2017-2022
I	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
II	Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemrov Babel	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel
		Pelaporan Rencana Aksi PPK terintegrasi dan Korusupgah	Pelaporan Rencana Aksi PPK terintegrasi dan Korusupgah
		Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kab/Kota	Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kab/Kota

		Penilaian Internal Zona Integritas	Penilaian Internal Zona Integritas
		Monev Laporan Gratifikasi	Monev Laporan Gratifikasi
		Penanganan Whistle Blower System	Penanganan Whistle Blower System
		Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN	Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN
III	Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
		Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
		Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah
		Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah
		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda
		Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung
IV	Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
		Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)
		Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah
		Survey Penilaian Integritas	Survey Penilaian Integritas

Gambar 2.5.1  
Jumlah Program Renja 2020 dan Renstra 2017-2022



Dari seluruh kegiatan yang ada didalam Renstra 2017-2022 sebanyak 26 kegiatan, tetapi hanya 23 kegiatan yang dilaksanakan pada Renja Tahun 2020.

Gambar 2.5.2  
Jumlah Kegiatan Renstra 2017-2022 dan Renja 2020





Tabel 2.5.2

Kesesuaian antara Program/Kegiatan di dalam Renja PD Tahun 2020 dan Renstra PD 2017-2022 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Program/kegiatan di dalam Renja PD Tahun 2020	Program/kegiatan di dalam Renstra PD 2017-2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>	<b>Sesuai</b>
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sesuai
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sesuai
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sesuai
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Sesuai
5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sesuai
<b>II</b>	<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur</b>	<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur</b>	<b>Sesuai</b>
1	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel	Sesuai
2	Pelaporan Rencana Aksi PPK terintegrasi dan Korsupgah	Pelaporan Rencana Aksi PPK terintegrasi dan Korsupgah	Sesuai
3	Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kab/Kota	Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kab/Kota	Sesuai
4	Penilaian Internal Zona Integritas	Penilaian Internal Zona Integritas	Sesuai

NO	Program/kegiatan di dalam Renja PD Tahun 2020	Program/kegiatan di dalam Renstra PD 2017-2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Monev Laporan Gratifikasi	Monev Laporan Gratifikasi	Sesuai
6	Penanganan Whistle Blower System	Penanganan Whistle Blower System	Sesuai
7	Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN	Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN	
<b>III</b>	<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Sesuai</b>
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Sesuai
2	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Sesuai
3	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Sesuai
4	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah	Sesuai
5	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Sesuai
6	Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Sesuai
<b>IV</b>	<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya</b>	<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya</b>	<b>Sesuai</b>
1	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Sesuai
2	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	Sesuai
3	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Sesuai
4	Survey Penilaian Integritas	Survey Penilaian Integritas	Sesuai

Tabel. 2.5.3

Perbandingan Target Capaian Kinerja Renstra dengan Perubahan Renja Tahun Anggaran 2020

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran	Perubahan Renja T.A 2020
----	------------------	----------------------------	----------------	-----------------	--------------------------

				pada Renstra	
<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan</b>					
1.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100 %	2.050.000.000	1.503.612.150
2.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100 %	7.961.000.000	489.059.250
3.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	100%	689.000.000	106.231.90
4.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dg tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	4 Dokumen	32.000.000	20.400.000
5.	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 Laporan	84.000.000	29.875.000
<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan aparatur</b>					
1.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	4 Laporan	363.000.000	63.800.000
2.	Pelaporan Rencana Aksi PPK terintegrasi dan Korsupgah	Persentase penyelesaian laporan dalam sistem MCP dan Korsupgah	100 %	140.000.000	0
3.	Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah evaluasi SAKIP dan EKPPD pada Provinsi dan Kab/Kota	8 LHE	300.000.000	79.800.000
4.	Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah Unit Kerja ZI	5Unit Kerja	250.000.000	18.860.000
5.	Monev Laporan Gratifikasi	Jumlah Laporan Gratifikasi	4 Laporan	165.000.000	0
6.	Penanganan Whistle Blower System	Jumlah laporan pengaduan melalui WBS	12 Laporan	135.000.000	0
7.	Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN	Persentase Kepatuhan Pelaporan	100 %	158.864.490	80.300.000
<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>					



1.	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	15%	611.100.000	84.200.000
2.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah PD yang diawasi terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaan Kinerja	150 obrik	3.087.000.000	2.475.482.794
3.	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rakor terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan	1 PKPT	329.000.000	0
4.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas penyelesaian Rekomendasi LHP Pengawasan Internal, APIP dan BPK	150 Obrik	800.000.000	481.750.000
5.	Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah	2 Laporan	417.000.000	182.128.000
6.	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah	15 laporan	270.112.000	94.050.000
<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya</b>					
1.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap PD	42 PD	275.625.000	20.750.000
2.	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	Tingkat Akurasi Data atas temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	100 %	178.957.000	0
3.	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan memahami SPIP	100 Peserta	375.000.000	0
4	Survey Penilaian Integritas	Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas	1 Laporan	-	0
<b>TOTAL</b>				<b>18.671.658.490</b>	<b>5.730.299.094</b>

## 2.6 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2020

dihitung berdasarkan laporan hasil realisasi anggaran pelaksanaan Renja yang tertuang pada DPA/DPPA Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV (bulan Oktober sampai dengan bulan Desember) Tahun 2020.

Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rata-rata capaian kinerja Inspektorat Daerah selanjutnya dapat diolah menjadi rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menghitung rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran.

Tabel 2.6

Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2020

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Realisasi Triwulan IV Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan IV Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)	
	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
<b>Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>	-	<b>2.149.178.300</b>	-		-	<b>2.071.706.491</b>	<b>100%</b>	<b>96,40%</b>
Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.5.03.612.150	25 %	464.501.644	100%	1.451.879.716	100%	96,56%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	106.231.900	25 %	187.390.600	100%	486.149.075	100 %	99,41%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	106.231.900	25 %	13.150.000	100 %	89.381.900	100%	84,14%
Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	4 dokum en	20.400.000	1 dokume n	18.117.000	4 dokume n	18.117.000	100 %	88,81%
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7 laporan	29.875.000	2 laporan	15.419.800	7 laporan	26.178.800	100%	87,63%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Realisasi Triwulan IV Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan IV Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)	
	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur</b>		242.760.000	-		-	223.874.305	100%	92,22 %
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel	4 laporan	63.800.000	1 laporan	46.945.000	4 laporan	52.795.000	100 %	82,75%
Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E- LHKPN	100 %	80.300.000	3 %	50.708.750	100 %	76.971.805	100%	95,86%
Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Terintegrasi dan Korsupgah	4 Lapora n	0,00	-	-	-	-	-	-
Penanganan Whistle Blower System	12 laporan	0,00	-	-	-	-	-	-
Evaluasi Lakip/EKPPD/LP PD Provinsi dan Kabupaten/Kota	8 Dokum en	79.800.000	-	1.600.000	8 dokume n	75.525.000	100 %	94,64%
Penilaian Internal Zona Integritas	5 unit kerja	18.860.000	1 unit kerja	16.110.000	5 unit kerja	18.582.500	100%	98,53%
Monev Laporan Gratifikasi	12 laporan	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Progrm Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>		3.317.610.794			-	3.203.004.700		96,55%
Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	15 %	84.200.000	15%	52.287.200	100%	52.287.200	100%	62,10%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Realisasi Triwulan IV Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan IV Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)	
	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	150 obrik	2.475.482.794	34 obrik	1.108.547.000	150 obrik	2.429.782.50	100 %	98,15%
Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	2 Rakor 1 PKPT	0.00	-	-	-	-	-	-
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	150 obrik	481.750.000	44 obrik	180.111.000	150 obrik	481.306.000	100%	99,91
Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 laporan	182.128.000	1 laporan	138.404.000	2 laporan	179.504.000	100 %	98,56%
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	15 laporan pengaduan	94.050.000	4 Laporan	21.575.000	10 laporan	60.125.000	66,67 %	63,93%
<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya</b>		20.750.000		0	100%	18.255.000	100%	87,98%
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	42 PD	20.750.000	42 PD	18.255.000	42 PD	18.255.000	100	87,98%
Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Pengawasan (Upgrading)	100 %	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	100 Peserta	0,00	0	0	0	0	0	0
Survey Penialian Integritas	1 Laporan	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		5.730.299.094			5.516.840.496		99,45 %	96,27%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d.							99,45	96,27%

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Realisasi Triwulan IV Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan IV Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)	
	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
PROGRAM IV)							%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM IV)							ST	ST

Keterangan:

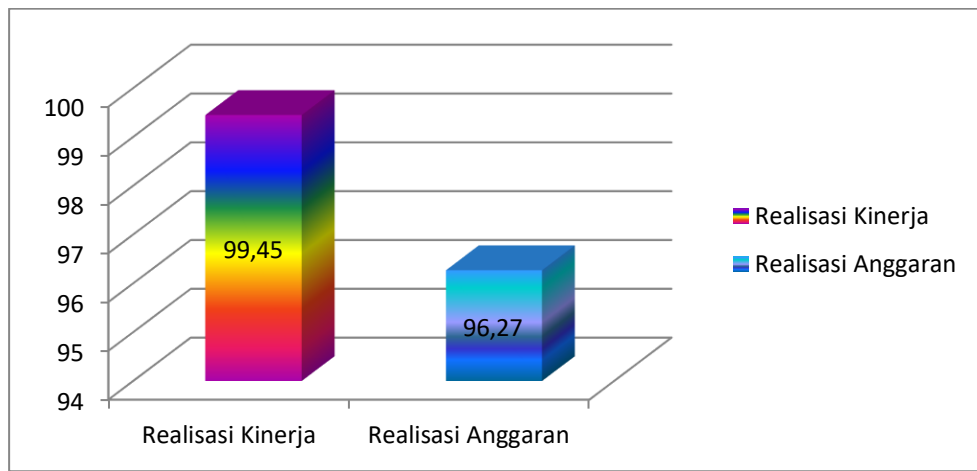
SR	: Sangat Rendah	( $\leq 50$ %)
R	: Rendah	(51 % $\leq 65$ %)
S	: Sedang	(66 % $\leq 75$ %)
T	: Tinggi	(76 % $\leq 90$ %)
ST	: Sangat Tinggi	(91 % $\leq 100$ %)

Berdasarkan Tabel 2. di atas terlihat bahwa dari 23 kegiatan yang dianggarkan di APBD Tahun 2020, ada 16 kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan realisasi keuangan dan kinerja. Sehingga untuk rata-rata capaian realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar 96,27% dan realisasi kinerja/fisik untuk seluruh program/kegiatan sebesar 99,45% dengan predikat Sangat Tinggi (ST).

Selain itu untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicapai, guna mewujudkan visi, misi Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah RKPD Tahun 2020 penjabarannya tertuang pada formulir E.81 Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dapat dilihat pada *Lampiran*.

Gambar 2.6

Grafik Realisasi Anggaran dan Kinerja Renja Tahun Anggaran 2020



### **BAB III**

#### **KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT**

#### **3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun Anggaran 2020**

Berdasarkan hasil capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2020, dapat dikemukakan bahwa realisasi anggaran sebesar 96,27 % dan kinerja sebesar 99,45 %.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja dan keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Semakin bertambahnya kewenangan pengawasan yang dilimpahkan kepada Inspektorat;
2. Pada Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah mengalami penurunan realisasi fisik sebesar 66,67 % dikarenakan menurunnya jumlah kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mana dengan menurunnya kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berarti kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin bertambah baik;
3. Dengan adanya penurunan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyebabkan realisasi kinerja rata-rata seluruh program/kegiatan tidak mencapai 100 %, hanya sebesar 99,45 % ; dan
4. Refocusing dan perubahan anggaran dampak wabah covid-19, sehingga adanya pengurangan anggaran kegiatan dan ada 7 (tujuh) kegiatan yang anggarannya menjadi 0 (nol) rupiah.

#### **3.3 Saran Tindak Lanjut**

1. Meningkatkan kinerja pengawasan dengan didukung ketersediaan anggaran yang cukup sesuai dengan amanah Undang-undang;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran agar realisasi kinerja program/kegiatan bisa tercapai sesuai dengan target kinerja ; dan
3. Bersama untuk menjaga pola hidup sehat, physical distancing dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan Pengendalian dan Evaluasi Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah triwulan IV Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian target realisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan IV Tahun anggaran 2020 untuk rata-rata capaian realisasi keuangan sebesar 96,27 % dengan predikat Sangat Tinggi (ST) dan capaian kinerja seluruh program/kegiatan sebesar 99,45 % dengan predikat Sangat Tinggi (ST);
2. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang realisasi fisiknya tidak mencapai 100 %, yaitu kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan realisasi fisik sebesar 66,67 %, dikarenakan menurunnya jumlah Laporan Pengaduan Kasus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mempengaruhi realisasi kinerja rata-rata seluruh program/kegiatan. Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan diimplementasikan ke dalam bentuk laporan, penggunaan indikator kinerja "jumlah laporan pengaduan kasus" dinilai kurang tepat, seharusnya indikator kinerja yang digunakan adalah "persentase jumlah laporan pengaduan kasus yang selesai ditindak lanjuti". Ini dikarenakan jumlah laporan pengaduan yang bersifat insidentil, sehingga tidak dapat dipastikan kuantitasnya.

#### **4.2 REKOMENDASI**

Sebagai upaya perbaikan pencapaian target kinerja di Triwulan IV Tahun 2020 maka telah dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan pertemuan secara berkala dengan PPTK terkait upaya dalam mencapai target kinerja dan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dengan hasil yang maksimal;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan target kinerja agar realisasi fisik/kinerja kegiatan dapat tercapai; dan
3. Dengan adanya kesalahan dalam menentukan indikator kinerja kegiatan yang sangat mempengaruhi dalam realisasi rata-rata kinerja program/kegiatan, sehingga untuk selanjutnya akan menjadi perhatian kami dalam menentukan indikator kinerja kegiatan.



Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) triwulan IV tahun anggaran 2020 ini dibuat dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan monitoring atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam meningkatkan kinerja, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, Januari 2021

INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
  
SUSANTO  
Kepala Utama Madya  
NIP. 196306121985031001

# LAMPPIBAN

**Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020**  
**TRIWULAN IV**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Skor (Nilai) SAKIP Perangkat daerah (Skor)	85,00	47.871.361.030	79,07	10.391.720.000	82	10.911.256.000																			
			Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	85,00		75,00		80										-										
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (%)	100,00	2.260.000.000	100,00	3.637.514.733	100,00	1.503.612.150	25	382.023.253	25	234.764.502	25	370.590.317	25	464.501.644	100	1.451.879.716	100,00%	96,56%						Tidak Ada()	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sarana Prasarana Perkantoran selama 12 bulan (%)	100,00	8.777.000.000	100,00	1.063.931.413	100,00	489.059.250	25	8.007.500	25	77.221.500	25	213.529.475	25	187.390.600	100	486.149.075	100,00%	99,40%						Tidak Ada()	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (%)	100,00	759.000.000	100,00	891.805.983	100,00	106.231.900	25	61.049.600	75	15.182.300	-	-	-	13.150.000	100	89.381.900	100,00%	84,14%						Tidak Ada()	
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (laporan)	4,00	92.000.000	4,00	39.126.350	4,00	20.400.000	-	-	1	-	2	-	1	18.117.000	4	18.117.000	100,00%	88,81%						Tidak Ada()	
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (Dokumen)	7,00	36.000.000	7,00	16.649.700	7,00	29.875.000	2,00	-	1	6.725.000	2	4.034.000	2	15.419.800	7	26.178.800	100,00%	87,63%						Tidak Ada()	
									2.149.178.300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100,00%	96,40%									
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																										
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	Prosentase tingkat capaian OPD dengan Laporan Kinerja BAIK (%)	80,00	6.188.894.700	100,00	1.199.000.000	75	1.432.244.700																			
		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah laporan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (laporan)	4,00	400.000.000	50,00	140.542.230	4	63.800.000	-	2	1.000.000	1	4.850.000	1	46.945.000	4	52.795.000	100,00%	82,75%							Tidak Ada()	
		Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN	Persentase Kepatuhan Pelaporan	0,00	-	100,00	56.267.450	100	80.300.000	90	17.906.555	5	2.731.500	2	5.625.000	3	50.708.750	100	76.971.805	100,00%	95,86%						Tidak Ada()	
		Pelaporan rencana aksi PPK terintegrasi dan korupsi	Persentase penyelesaian laporan dalam sistem MCP dan Korupsi	4,00	170.000.000	50,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%						Tidak Ada()		

		Evaluasi Lapid dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah evaluasi SAKIP dan EKPPD pada Provinsi dan Kab/Kota	8,00	350.000.000	100,00	-	8	79.800.000	-	-	1	700.000	7	73.225.000		1.600.000	8	75.525.000	100,00%	94,64%							Tidak Ada()					
		Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah unit kerja Zona Integritas (Dokumen)	5,00	350.000.000	100,00	1.981.000	5	18.860.000	-	-	2	1.242.500	2	1.230.000	1	16.110.000	5	18.582.500	100,00%	98,53%							Tidak Ada()					
		Monev Laporan Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi (Laporan)	12,00	185.000.000	100,00	12.930.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%							Tidak Ada()					
		Penanganan Whistle Blower System	Jumlah pengaduan melalui Whistle Blower System (laporan)	12,00	156.000.000	100,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%							Tidak Ada()					
									242.760.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100,00%	92,22%											
										Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah (%)	98,00	29.781.840.000	38,04	6.058.961.000	95	6.165.669.000										-														
			Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti (%)	95,00		69,60		90											-														
			Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat (%)	100,00		100,00		100											-														
		Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah (%)	20,00	674.000.000	15,00	284.954.000	15	84.200.000	-	-	-	-	-	-	15	52.287.200	15	52.287.200	100,00%	62,10%							Tidak Ada()					
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Perangka Daerah yang diawasi terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaan Kinerja (obrik)	160,00	3.403.000.000	150,00	5.389.774.183	150	2.475.482.794	30	213.225.000	44	483.765.500	42	624.245.000	34	1.108.547.000	150	2.429.782.500	100,00%	98,15%							Tidak Ada()					
		Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Jumlah rakor yang dilaksanakan terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan (rakor)	2,00	363.000.000	2,00	225.493.478	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%							Tidak Ada()					
		Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi dan pemantauan yang dilaksanakan atas penyelesaian rekomendasi LHP APIP dan BPK (obrik)	160,00	915.000.000	150,00	1.077.500.284	150	481.750.000	20	59.550.000	46	95.545.000	40	146.100.000	44	180.111.000	150	481.306.000	100,00%	99,91%							Tidak Ada()					
		Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah laporan tim satgas Saber pungli atas uang dan barang daerah (laporan)	2,00	460.000.000	2,00	364.056.700	2	182.128.000	-	-	-	-	1	41.100.000	1	138.404.000	2	179.504.000	100,00%	98,56%							Tidak Ada()					
		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah pengaduan kasus yang ditindak lanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah (laporan pengaduan)	20,00	297.799.000	15,00	211.823.100	15	94.050.000	2	11.775.000	3	25.900.000	1	875.000	4	21.575.000	10	60.125.000	66,67%	63,93%							Tidak Ada()					
									3.317.610.794	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											99,06%	96,55%											
										Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	Peningkatan capaian Level Kapabilitas APIP (level)	3,00	5.873.407.000	2,00	1.067.500.000	3	1.420.625.000										-														
			Peningkatan Capaian Level Maturitas SPIP (level)	3,00		3,00		3											-														
		Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas pemeriksaan APIP dan BPK (%)	100,00	197.300.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%							Tidak Ada()					

		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang terlayani dalam sisatgas SPIP (Perangkat Daerah)	42,00	303.876.000	42 PD	153.329.110	42	20.750.000		-		-		-	42	18.255.000	42	18.255.000	100,00%	87,98%							Tidak Ada()				
		Konsultasi Audit	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan (Perangkat Daerah)	42,00	195.000.000	0,00	-	42	-		-		-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%							Tidak Ada()				
		Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat SPIP (Peserta)	100,00	425.000.000	0,00	-	100	-		-		-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%							Tidak Ada()				
		Survey Penilaian Integritas			242.000.000				-		-		-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%							Tidak Ada()				
									20.750.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	87,98%											
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi											
								5.730.299.094		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										99,45%	96,27%											
	Generated at: 07-01-2021 [ 13:24:09 ] By: User SKPD-17 dari EMONEV_babel								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi												

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN**  
**Tahun Anggaran 2020**  
**TRIWULAN IV**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.05.4.05.01.01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah										
4.05.4.05.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.688.502.500,00	1.503.612.150,00	100,00%	1.503.612.150,00	100,00%	26,24%	1.451.879.716,00	96,56%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.856.710.000,00	489.059.250,00	100,00%	489.059.250,00	100,00%	8,53%	486.149.075,00	99,40%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	444.500.000,00	106.231.900,00	100,00%	106.231.900,00	100,00%	1,85%	89.381.900,00	84,14%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.01.05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00%	20.400.000,00	100,00%	0,36%	18.117.000,00	88,81%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.01.06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.875.000,00	29.875.000,00	100,00%	29.875.000,00	100,00%	0,52%	26.178.800,00	87,63%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.02	Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur										
4.05.4.05.01.02.07	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	94.800.000,00	63.800.000,00	100,00%	63.800.000,00	100,00%	1,11%	52.795.000,00	82,75%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.02.09	Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN	98.300.000,00	80.300.000,00	100,00%	80.300.000,00	100,00%	1,40%	76.971.805,00	95,86%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.02.10	Pelaporan rencana aksi PPK terintegrasi dan koruspgah	9.030.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.02.11	Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	149.800.000,00	79.800.000,00	100,00%	79.800.000,00	100,00%	1,39%	75.525.000,00	94,64%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.02.12	Penilaian Internal Zona Integritas	18.860.000,00	18.860.000,00	100,00%	18.860.000,00	100,00%	0,33%	18.582.500,00	98,53%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.02.13	Monev Laporan Gratifikasi	20.160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.02.14	Penanganan Whistle Blower System	31.010.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.03	Program Pengawasan dan Pembinaan Pegelolaan Keuangan dan Asset Daerah										
4.05.4.05.01.03.01	Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Baranq Daerah	84.200.000,00	84.200.000,00	100,00%	84.200.000,00	100,00%	1,47%	52.287.200,00	62,10%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.03.02	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.857.000.000,00	2.475.482.794,00	100,00%	2.475.482.794,00	100,00%	43,20%	2.429.782.500,00	98,15%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.03.03	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	187.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.03.04	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	468.250.000,00	481.750.000,00	100,00%	481.750.000,00	100,00%	8,41%	481.306.000,00	99,91%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.03.05	Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kep. Bangka Belitung	182.128.000,00	182.128.000,00	100,00%	182.128.000,00	100,00%	3,18%	179.504.000,00	98,56%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.03.07	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	186.032.794,00	94.050.000,00	100,00%	94.050.000,00	66,67%	1,09%	60.125.000,00	63,93%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.04	Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya										
4.05.4.05.01.04.03	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	69.750.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.04.05	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	43.250.000,00	20.750.000,00	100,00%	20.750.000,00	100,00%	0,36%	18.255.000,00	87,98%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.04.06	Konsultasi Audit	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.04.07	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	250.085.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.04.08	Survey Penilaian Integritas	140.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
		13.930.543.294,00	5.730.299.094,00	100,00%	5.730.299.094,00		99,45%	5.516.840.496,00	96,27%		



## **PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG INSPEKTORAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jalan Pulau Belitung Kelurahan Air Itam Telepon (0717) 439313 Fax. (0717) 434693 Pangkalpinang